

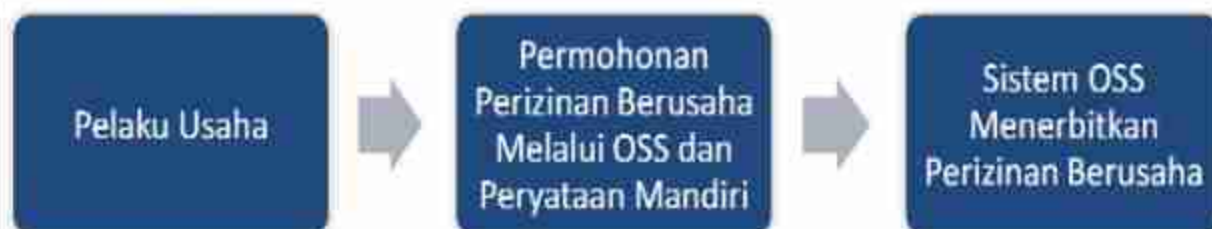
**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA MIKRO KECIL (NON UMK)
RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO**

Orang Perseorangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
2.	Persyaratan	1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI); 2. Memiliki Passpor bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA); 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; 4. Memiliki NPWP bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; 5. Memiliki Hak Akses OSS berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id ;

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan

A. Bagan Alir Perizinan Non UMK Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Orang Perseorangan



B. Kategori Pelaku Usaha



C. Langkah Pendaftaran hak Akses Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>
2. Pilih **DAFTAR**
3. Pilih **Skala Usaha Non UMK**
4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha Non UMK**
5. Lengkapi **Formulir Pendaftaran**

6. Cek email Anda dan klik tombol **Aktivasi**
7. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**
8. Pendaftaran **Berhasil**
9. Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke sistem **OSS**

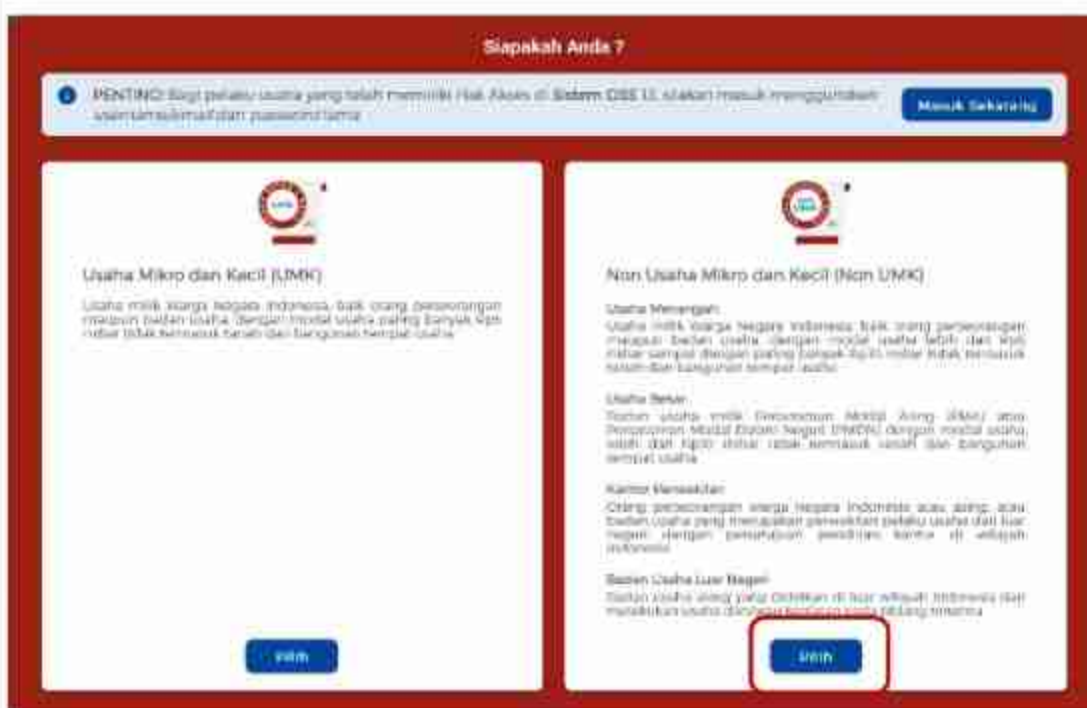
1. Kunjungi <https://oss.go.id/>



2. Pilih **DAFTAR**



3. Pilih **Skala Non UMK**



4. Pilih **Jenis Pelaku Usaha Non UMK**

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Jenis Pelaku Usaha

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal **Daftar**

- Pilih Jenis Pelaku Usaha (Orang Perseorangan atau Badan Usaha)
- Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia

5. Lengkapi Formulir Pendaftaran

Lengkapi data jika sebagai Non UMK (Orang Perseorangan)

Skala Usaha Anda adalah Non UMK

Jenis Pelaku Usaha

Orang Perseorangan

Nomor Induk Kependudukan

Tanggal Lahir

Alamat Email

+62 Nomor Telepon Seluler

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Batal **Daftar**

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Induk Kependudukan
 2. Tanggal Lahir
 3. Alamat Email
 4. Nomor Telepon Seluler
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik tombol **Daftar**

6. Cek email Anda dan klik tombol **Aktivasi**

 OSS

Selamat datang **WILDAN ALVIYARDA**

Pendaftaran registrasi dan akses Online Single Submission (OSS) telah selesai. Berikut ini adalah data profil Anda.

Nama user	WILDAN ALVIYARDA
Identifikasi elektronik	KTP / 52756201788008

Aktivasi

Sila hubungi di 021-5534 567890. Kliklah untuk lebih banyak informasi di bawah ini.

Salam,
Timbaga OSS - Kementerian Investasi/BDHI

021-5534 5678
info@oss.go.id
Silakan kunjungi Single Submission ke-34 Jakarta (OSS) Indonesia

7. Cek email Anda untuk mengetahui **Username** dan **Password**



8. Pendaftaran Berhasil



9. Hak Akses Anda siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS



Risiko Rendah dan Menengah Rendah - Orang Perseorangan

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **Captcha** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**
6. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**
7. Isi Data Pemilihan Bidang Usaha
8. Lengkapi **Data Detail Usaha**
9. Lengkapi **Data Produk/Jasa**
10. Periksa **Daftar Produk/Jasa**
11. Periksa **Data Usaha**
12. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**
13. Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)**
14. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**
15. Periksa **Draf Perizinan Berusaha**
16. **Perizinan Berusaha** terbit

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke **e-mail** yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



3. Pilih **Masuk**



4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**



5. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**



6. Lengkapi Data Pelaku Usaha

- Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 2. Nama
 3. Jenis Kelamin
 4. Tempat/Tanggal Lahir
 5. Nomor Telepon
 6. Alamat Sesuai KTP
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
 2. Email
 3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika **sudah** memiliki)
 4. BPJS Kesehatan (Jika **sudah** memiliki)Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belum memiliki** BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan
- Klik tombol **SIMPAN DATA**
- Klik tombol **ISI BIDANG USAHA**

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

7. Lengkapi Data Bidang Usaha

Catatan: Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

- Sistem akan menampilkan **Form Pemilihan Bidang Usaha**
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)
 2. Bidang Usaha
(Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUPM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
 3. Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
 4. Ruang Lingkup Kegiatan
- Klik tombol **SIMPAN**.

8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di DARAT

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?
(Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama, Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 3. Nama Usaha / Kegiatan
 4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**jika ada**)
(Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian **proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
 5. Lokasi Kegiatan Usaha
 6. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
 7. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut?
(**Setelah** memilih, akan **muncul pilihan** terkait **Status Lahan Usaha** dan **pilih yang sesuai**)
 8. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini?
(Jika **Ya**, akan **muncul formulir pilihan** terkait **Bangunan** dan **pilih yang sesuai**)
(Jika **Milik Sendiri**, akan **muncul formulir Detail Bangunan** seperti **jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF** di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu **lengkapi yang sesuai**)

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?
 2. Alamat Usaha.
 3. Provinsi
 4. Kabupaten/Kota
 - a) Jika **Kabupaten/Kota** terpilih ada **Kawasan**, akan muncul pilihan terkait **Apakah lokasi usaha berada di Kawasan (KI, KEK, KPBPB) dan Nama Kawasan.**
 - b) Jika **Kabupaten/Kota** terpilih tidak ada **Kawasan**, akan muncul **Kecamatan dan Kelurahan/Desa**, lalu pilih yang sesuai.
 5. Kode Pos
 6. Tipe Gambar Peta
 - a) Jika **Point**, maka isilah titik **Latitude dan Longitude** sesuai dengan lokasi usaha.
 - b) Jika **Polygon**, maka unggah **file polygon** dalam format **SHP Complete**.

- Jika **Point**, maka isilah titik **Latitude dan Longitude** sesuai dengan lokasi usaha.

- Jika **Polygon**, maka unggah **file polygon** dalam format **SHP Complete**.

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Objek Vital Nasional? (Jika Ya, maka unggah **File Keputusan Objek Vital Nasional**)
- Lalu klik tombol **CEK RDTR dan Kegiatan**. (Jika ada)
 - a) Jika **lokasi usaha tersedia RDTR, kegiatan usaha dan lokasi sesuai RDTR**, maka akan muncul **notifikasi** ketentuan-ketentuan dalam RDTR yang Anda pilih dan jika sudah sesuai maka dapat klik tombol **LANJUT**.
 - b) Jika **lokasi usaha tersedia RDTR**, sedangkan **kegiatan usaha dan lokasi TIDAK sesuai RDTR**, maka Anda harus mengubah **KBLI** atau **lokasi usaha** dengan klik tombol **BELUM**.
 - c) Jika **lokasi usaha TIDAK tersedia RDTR**, maka akan muncul pertanyaan terkait dengan **Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Pembelian dan Pematangan Tanah
 2. Bangunan / Gedung
 3. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 4. Mesin / Peralatan Impor
 5. Mesin / Peralatan (terisi otomatis)
 6. Investasi Lain-Lain
 7. Total Modal Tetap (terisi otomatis)
 8. Modal Kerja 3 Bulan
 9. Total Nilai Investasi (terisi otomatis)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

Nama Usaha (maksudnya nama kegiatan/usaha, bukan nama legalitas usaha Anda sebagai Warga Negara Indonesia)
 Jenis Usaha (Kategori Usaha)
 Alamat Usaha (Alamat Usaha)
 Nomor Telepon Usaha (Nomor Telepon Usaha)
 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 Jumlah Tenaga Kerja Asing
 Tombol: **TAMBAH PRODUK/JASA**

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 9**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di HUTAN

Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan?
 Apakah sudah memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
 Nama Usaha / Kegiatan
 Apakah kegiatan Usaha ini berada di dalam wilayah, dengan kegiatan usaha sebelumnya?
 Jenis Kegiatan Usaha
 Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi Kawasan Hutan sebelumnya?
 Jenis Rekomendasi Gubernur

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Pemberbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? (Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isilah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 3. Nama Usaha / Kegiatan
 4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**Jika ada**) (Pertanyaan ini akan muncul pada pengisian **proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
 5. Lokasi Kegiatan Usaha
 6. Apakah sudah memiliki IPPKH/Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan/Pemanfaatan Kawasan Hutan/Konservasi Kawasan Hutan sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nomor, Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

7. Jenis Perizinan lokasi Hutan yang dibutuhkan:

- a) Jika pilih **Penggunaan / Pelepasan**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (**Penggunaan / Pelepasan**) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?, Apakah lokasi yang dimohonkan dalam wilayah kerja Perum Perhutani?
- b) Jika pilih **Pemanfaatan / Konservasi**, akan **muncul pilihan** yang berisi Jenis (**Pemanfaatan / Konservasi**) Kawasan Hutan, Apakah Anda memiliki surat rekomendasi Gubernur?

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Luas Lahan Usaha: Satuan:

Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini? Ya Tidak

Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota? Ya Tidak

Keterangan:
 - Lahan kegiatan usaha dalam kota termasuk kawasan kota administratif, kawasan kota kecamatan, dan kawasan desa/kelurahan.
 Catatan:
 - Lokasi usaha perkebunan dalam zona hutan lindung berada di perbatasan antara Provinsi sendiri dan Provinsi lain.
 - SPK lokasi yang dalam zona hutan lindung berada di perbatasan antara Kabupaten/Suara dan Kota/Daerah

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Luas Lahan Usaha dan Satuannya
 2. Apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan usaha ini? (Jika **Ya**, akan **muncul formulir pilihan** terkait **Bangunan** dan **pilih yang sesuai**) (Jika **Milik Sendiri**, akan **muncul formulir Detail Bangunan** seperti **jumlah bangunan, PBG/IMB, dan SLF** di bagian setelah pengisian lokasi usaha, lalu **lengkapi yang sesuai**)
 3. Apakah lokasi usaha berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?

Alamat Usaha
 Provinsi
 Kabupaten / Kota
 Kecamatan
 Kelurahan / Desa
 Kode Pos

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Alamat Usaha
 2. Provinsi
 3. Kabupaten / Kota
(Jika **Kabupaten/Kota yang terpilih ada Kawasan**, akan **muncul pilihan** terkait **Apakah lokasi usaha berada di Kawasan?** dan **Nama Kawasan**, lalu pilih yang sesuai.)
 4. Kecamatan (jika ada)
 5. Kelurahan / Desa (jika ada)
 6. Kode Pos

Data Investasi untuk Bidang Usaha

Pembelian dan Pematangan Tanah
 Bangunan / Gedung
 Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 Mesin / Peralatan Impor
 Mesin / Peralatan
 Investasi Lain-Lain
 Total Modal Tetap
Investasi dalam bentuk tanah, bangunan, gedung, peralatan, mesin, dan lain-lain
 Modal Kerja 3 Bulan
Modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usaha
 Total Nilai Investasi
Salah satu komponen dari modal tetap dan modal kerja

VALIDASI RISIKO

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Pembelian dan Pematangan Tanah
 2. Bangunan / Gedung
 3. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 4. Mesin / Peralatan Impor
 5. Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 6. Investasi Lain-Lain
 7. Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
 8. Modal Kerja 3 Bulan
 9. Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

Desain Produk/Jasa

Lokasi Kegiatan Usaha
 Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 Jumlah Tenaga Kerja Asing
 Jumlah Tenaga Kerja Asing

Data Produk/Jasa

TAMBAH PRODUK/JASA

No	Kejelasan	Tujuan	Tingkat Produksi

Anda dapat menambahkan atau menghapus produk yang terdaftar dalam usaha

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 9**).

Jika pilih "Lokasi kegiatan usaha" di LAUT

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?

Apakah anda memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) berbeda/cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?

Lokasi Kegiatan Usaha

Apakah akan lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang?

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika **Sudah**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit)
 2. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? (Jika **Ya**, akan **muncul kolom NPWP** dan isitah dengan 15 digit nomor NPWP yang sesuai)
 3. Nama Usaha / Kegiatan
 4. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? **jika ada** (Pertanyaan ini akan muncul pada **pengisian proyek kedua dan seterusnya** ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
 5. Lokasi Kegiatan Usaha
 6. Apakah atas lokasi dan kegiatan yang diajukan telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang? (Jika **Ya**, akan **muncul formulir** yang berisi Nomor, Lampiran File, Tanggal Terbit, Tanggal habis masa berlaku)

Luas/Panjang Perairan yang diperlukan

Kedalaman Lokasi

Bencana Laut Berpotensi

Apakah perencanaan infrastruktur wilayah?

Nama Perairan

Provinsi

Koordinat

Apakah lokasi lintas provinsi?

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Luas/Panjang Perairan yang diperlukan dan Satuannya
 2. Kedalaman Lokasi dan Satuannya
 3. Rencana Luas Bangunan dan Satuannya
 4. Apakah perusahaan melakukan reklamasi?
 5. Nama Perairan
 6. Provinsi (Akan **muncul kolom Proyek Strategis Nasional** pada beberapa **Provinsi tertentu**. Lalu, jika pilih 'Ya' termasuk **Proyek Strategis Nasional**, akan **muncul** kolom selanjutnya yang berisi **Pilih Daftar Proyek Strategis Nasional** dan **Upload Rekomendasi Proyek Strategis Nasional (opsional)**)
 7. Koordinat (Unggah **file koordinat Polygon** dalam bentuk **excel**)
 8. Apakah lokasi lintas provinsi?

Apakah lokasi lintas provinsi?

Tambah Provinsi

FORM LINTAS PROVINSI

Pilih Lokasi

Posisi Lokasi

Alamat

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Kelurahan

Provinsi

- Jika pilih **Ya** pada pertanyaan **Apakah lokasi lintas provinsi?**, maka akan **muncul data lintas provinsi beserta alamatnya**.
- Klik tombol **Tambah Provinsi** untuk menambahkannya.
- Sistem akan menampilkan **Form Lintas Provinsi** dan data yang harus Anda lengkapi:
 1. Posisi Lokasi (Pilih lintas **Daratan** atau **Laut**)
 2. Provinsi
 3. Alamat
 4. Kabupaten / Kota
 5. Kecamatan
 6. Kelurahan

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Pembelian dan Pematangan Tanah
 2. Bangunan / Gedung
 3. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 4. Mesin / Peralatan Impor
 5. Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 6. Investasi Lain-Lain
 7. Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
 8. Modal Kerja 3 Bulan
 9. Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Deskripsi Kegiatan Usaha
 2. Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
 3. Tenaga Kerja Indonesia (Laki-Laki)
 4. Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan)
 5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (**otomatis terisi**)
 6. Jumlah Tenaga Kerja Asing
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK/JASA** (lanjut ke **langkah 9**).

Undang-Undang Cipta Kerja
Buat Mudah, Cepat

9. Lengkapi Data Produk/Jasa

- Data yang harus Anda lengkapi:
 1. Jenis Produk/Jasa
(Jika pilih "**Lainnya**", akan **muncul kolom free text** dan **isi** sesuai **produk/jasa** yang dilakukan pada **bidang usaha/KBLI** terpilih.)
 2. Kapasitas (per Tahun)
 3. Satuan Kapasitas
- Klik tombol **SIMPAN**.

10. Periksa Daftar Produk/Jasa



- Sistem akan menampilkan data:
 1. Kapasitas
 2. Satuan
 3. Jenis Produksi
- Klik tombol **SELESAI**.

11. Periksa Data Usaha



- Sistem akan menampilkan data:
 1. Bidang Usaha (**KBLI**)
 2. Lokasi Usaha
 3. Data Usaha (**Jumlah tenaga kerja dan Modal Usaha**)
- Klik **kotak centang/checkbox**
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha (Untuk Lokasi Usaha Yang Perlu Verifikasi KKPR)

Daftar kegiatan usaha



- Jika **lokasi usaha** yang dimohonkan **tidak berada** pada wilayah yang sudah **memiliki RDTR** atau **bukan di Kawasan Industri/KEK/KPBPB** atau **tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam isian terkait Pasal 181 PP 5/2021**, maka sistem akan mengirimkan notifikasi permohonan Persetujuan KKPR (PKKPR) kepada Kementerian ATR/Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, sehingga status di sini tertulis **"PKKPR dalam proses verifikasi"** dan Pelaku Usaha **perlu** melalui proses **Pemenuhan Persyaratan** pada menu yang sudah disediakan (dapat dilihat pada **langkah 14**).
- Tahapan ini juga berlaku sama untuk **lokasi usaha di Hutan** dan **Laut**, dengan kondisi berikut:
 - a) Untuk **lokasi usaha di Hutan**, dimana memerlukan pemenuhan persyaratan dan verifikasi (**Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/Pelepasan Kawasan Hutan**) oleh **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**.
 - b) Untuk **lokasi usaha di Laut**, dimana memerlukan pemenuhan persyaratan dan verifikasi (**Persetujuan KKPR Laut**) oleh **Kementerian Kelautan dan Perikanan**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Fasti, Mudah, Cepat

Periksa daftar kegiatan usaha

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No.	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	59111	Kecamatan Pajeneh	Jenis Kegiatan: Jasa Perawatan Nama: M. Mochlis Sidiq A. NIK: 3101011980080001 Alamat: Jl. Pajeneh Raya No. 10 Kecamatan Pajeneh, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Kode Pos: 13153 Nomor Telp: 021-50000000 Nomor Email: m.mochlis@kps.go.id Tanggal Didirikan: 2018-08-01 Jenis Usaha: Jasa Perawatan Luas Lantai: 1000 m ²	Usaha Mikro	Rendah	Ya	OK (Tidak Perlu Dimasukkan)

- Sistem akan menampilkan:
 - KBLI
 - Lokasi Usaha
 - Data Usaha
 - Skala Usaha
 - Tingkat Risiko
 - Pernyataan Mandiri
 - Status

- Jika **KKPR diterbitkan otomatis atau telah diverifikasi dan disetujui**, Anda dapat melanjutkan proses permohonan dengan klik tombol ikon "V".
- Lalu klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**.
- Untuk Perizinan Non UMK **Risiko Rendah** lanjut ke **langkah 14**.
- Untuk Perizinan Non UMK **Risiko Menengah Rendah** lanjut ke **langkah 13**.

Undang-Undang
Pasal 10

13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN USAHA YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan?

Belum

LANJUT

- Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi **"Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?"** yang harus Anda pilih:
 - Jika pilih **Sudah**, lanjut ke **langkah 13.a** untuk **memilih jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
 - Jika pilih **Belum**, lanjut ke **langkah 13.b** untuk **lengkapi formulir** parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN USAHA YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?

Sudah

Jenis dokumen Persetujuan Lingkungan

Belum

LANJUT

- Jika pilih **Sudah**, akan **muncul kolom pilihan** dan pilihlah **jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
- Klik tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (**langkah 14**) **tanpa melalui** proses pemilihan parameter

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

Bilakan pilih sesuai keterlaksanaan dan/atau kegiatan Anda.

Wajib (memiliki/persetujuan dokumen):

Belum Lanjut

- Jika pilih **Belum**, sistem akan menampilkan konfirmasi "**Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan**" yang harus Anda pilih **berdasarkan KBLI/Bidang Usaha** terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

- Jika Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan**, maka data yang harus Anda lengkapi:
 1. **Parameter Lingkungan**, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
(Kemudian sistem akan **menampilkan jenis kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
 2. **Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- Klik tombol **LANJUT**.

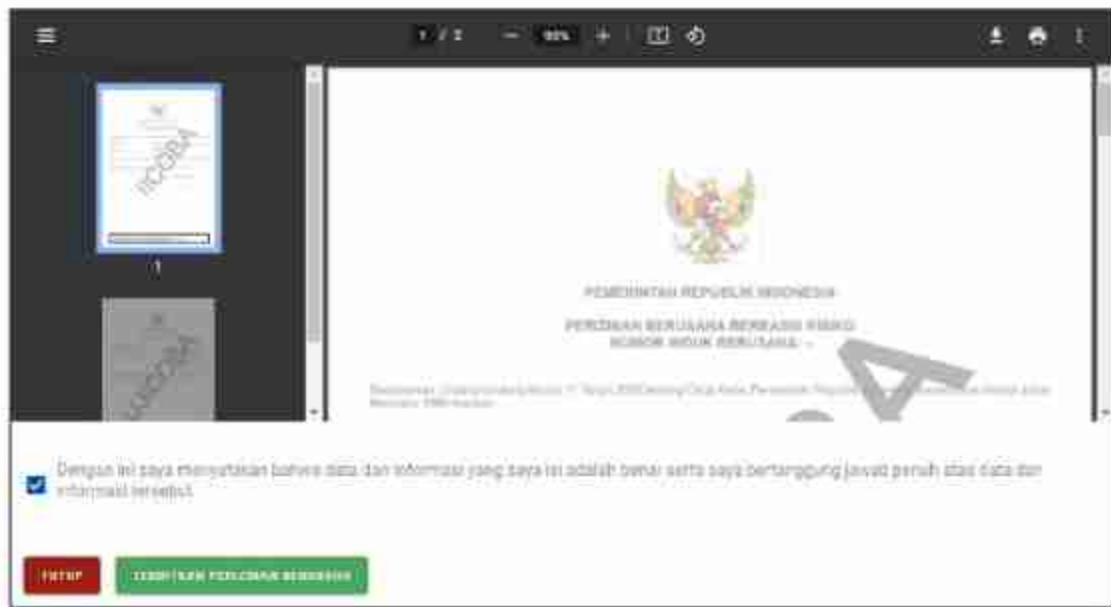
Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

14. Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**

- Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri** sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiapan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiapan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
- Baca, pahami, dan klik **kotak centang/check box** pada setiap Pernyataan Mandiri yang tertera.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

15. Periksa Draft Perizinan Berusaha



- Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
- Klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**.

16. Perizinan Berusaha telah terbit

a) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)

DAFTAR KEGIATAN USAHA							
No	NIB	Lokasi Usaha	Data Usaha	Status Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	10299	Alamat Jalan Kecamatan: Kab. Bandung Provinsi: Dki	Jumlah Tenaga Kerja: Indonesia: 22 Modal Usaha: Rp 5.000.000.000.000	Usaha Selesai	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan Mandiri K3: Cetak Pernyataan Mandiri Kelayakan Memenuhi Standar Usaha: Cetak Surat Pernyataan Kesanggupan Penghasilan dan Pemertasaan (Surat Pernyataan SPK): Cetak 	NIB Terbit

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
 1. NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
 2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

b) Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)

DAFTAR KEGIATAN USAHA							
No	NIB	Lokasi Usaha	Data Usaha	Status Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	10299	Alamat Jalan Kecamatan: Kab. Bandung Provinsi: Dki	Jumlah Tenaga Kerja: Indonesia: 22 Modal Usaha: Rp 5.000.000.000.000	Usaha Selesai	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Pernyataan Mandiri K3: Cetak Pernyataan Mandiri Kelayakan Memenuhi Standar Usaha: Cetak Surat Pernyataan Kesanggupan Penghasilan dan Pemertasaan (Surat Pernyataan SPK): Cetak 	NIB Terbit

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
 1. NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
 2. Sertifikat Standar, klik tombol **CETAK SERTIFIKAT STANDAR**.
 3. PKPLH/SKKL, klik **CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL** (jika ada)
 4. Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

a) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetak NIB)



b) Perizinan Berusaha telah terbit (Contoh Cetakan SS)

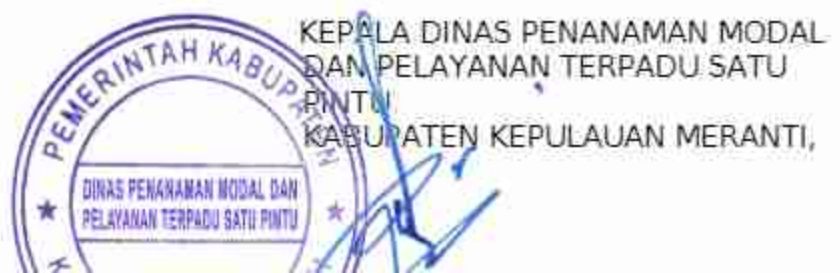


4.	Jangka waktu penyelesaian	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	1. NIB – Usaha Resiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar – Usaha Resiko Menengah Rendah
7.	Sarana / Prasarana /Fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi AC; 2. Loker Pelayanan Front Office; 3. Loker Pelayanan Informasi dan Penyerahan Izin; 4. Alat tulis kantor; 5. Meja dan Kursi;

		6. Komputer dan Printer; 7. Telepon; 8. Lemari Dokumen; 9. Scaner dan Fotocopy; 10. Internet (Wi-fi); 11. Kotak saran, pengaduan dan IKM; 12. Kursi roda; 13. Televisi; 14. Media Informasi Touchscreen; 15. Website dan Email;
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Mampu Mengoperasikan Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
9.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
10.	Pengawasan internal	Dilaksanakan secara terus-menerus oleh : 1. Atasan langsung secara berjenjang 2. Pejabat Fungsional dan Struktural 3. Tim Audit Internal
11.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jln. Merdeka No. 83 Selatpanjang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Telepon/fax : (0763) 33630 Hp/wa : 082283677312 Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com Website: dpmptsp.merantikab.go.id Fb : DPMPTSP kepulauan meranti Instagram : dpmptspkabmeranti
12.	Jaminan pelayanan	1. Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima. 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya. 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System. 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Melayani Dengan Sepenuh Hati
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat - Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik) 3. Petugas pelaksana pelayanan diberikan reward sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan punishmen apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Selatpanjang
 Pada Tanggal : 08 Agustus

2022



H. SUTARDI, S.Sos, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
19660929 198603 1 009